



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 163 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM SEBAGAI PEDOMAN

KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengubah beberapa ketentuan dan mengatasi permasalahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 163 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM SEBAGAI PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 dan tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium, angka 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, bagian Ketentuan Umum Nomor 4, diubah sehingga bagian Ketentuan Umum nomor 4, berbunyi sebagai berikut :

4. Besaran honorarium pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas diberlakukan bagi Pejabat Negara dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, termasuk juga Pejabat Negara, TNI/POLRI, PNS di luar Pemerintah Kota Probolinggo dan masyarakat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersendiri; dan

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium, angka 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, poin 2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, diubah sehingga huruf A pada angka 2 poin 2.1 berbunyi sebagai berikut :

2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Petugas K3

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	Pagu Belanja Langsung :		
	a. Pagu s.d 1 milyar	org/bulan	100.000
	b. Pagu 1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	150.000
	c. Pagu 5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	200.000
	d. Pagu 10 milyar s.d 20 milyar	org/bulan	300.000
	e. Pagu 20 milyar s.d 50 milyar	org/bulan	400.000
	f. Pagu 50 milyar s.d 75 milyar	org/bulan	500.000
	g. Pagu 75 milyar s.d 100 milyar	org/bulan	600.000
	h. Pagu di atas 100 milyar	org/bulan	750.000
<b>2.</b>	<b>Petugas (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3</b>		
	<b>Pagu Belanja Langsung Pekerjaan Konstruksi yang ditangani :</b>		
	<b>a. Pagu s.d 1 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>50.000</b>
	<b>b. Pagu 1 milyar s.d 5 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>100.000</b>
	<b>c. Pagu 5 milyar s.d 10 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>150.000</b>

	<b>d. Pagu 10 milyar s.d 20 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>250.000</b>
	<b>e. Pagu 20 milyar s.d 50 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>350.000</b>
	<b>f. Pagu 50 milyar s.d 75 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>450.000</b>
	<b>g. Pagu 75 milyar s.d 100 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>550.000</b>
	<b>h. Pagu di atas 100 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>700.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ahli (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3</b>		
	<b>Pagu Belanja Langsung Pekerjaan Konstruksi yang ditangani :</b>		
	<b>a. Pagu s.d 1 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>75.000</b>
	<b>b. Pagu 1 milyar s.d 5 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>125.000</b>
	<b>c. Pagu 5 milyar s.d 10 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>175.000</b>
	<b>d. Pagu 10 milyar s.d 20 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>275.000</b>
	<b>e. Pagu 20 milyar s.d 50 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>375.000</b>
	<b>f. Pagu 50 milyar s.d 75 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>475.000</b>
	<b>g. Pagu 75 milyar s.d 100 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>575.000</b>
	<b>h. Pagu di atas 100 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>725.000</b>

**Ketentuan :**

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi s/d 100 juta dan Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya s/d 200 juta.**
- b. Besaran honorarium pada huruf a, dihitung dari jumlah total nilai kegiatan pengadaan langsung yang ditangani selama 1 (satu) tahun sesuai dengan yang ada di dalam Rancangan Umum Pengadaan dan diterima secara bulanan selama 1 tahun.**
- c. Honorarium Petugas dan Ahli (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3 adalah honorarium yang diberikan kepada Petugas atau Ahli (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3 yang telah memiliki sertifikat (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3, dalam melaksanakan tugasnya membantu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan pada saat evaluasi dokumen pemilihan.**
- d. Besaran honorarium pada huruf c, dihitung dari jumlah total nilai kegiatan belanja langsung konstruksi yang ditangani selama 1 (satu) tahun sesuai dengan yang ada di dalam Rancangan Umum Pengadaan dan diterima pada bulan saat Petugas/Ahli (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3 menjalankan tugasnya.**

5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, pada romawi II BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI) huruf A Honorarium, angka 3 Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, poin 3.3 Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset di SKPD/SKPKD, diubah sehingga huruf A pada angka 3 poin 3.3 berbunyi sebagai berikut :

3.3 Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset di SKPD/SKPKD

No	Uraian	Satuan	Besaran Honorarium
1.	<b>Bendahara Umum Daerah</b>	org/bulan	1.000.000
2.	<b>Kuasa Bendahara Umum Daerah</b>		
	a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	org/bulan	500.000
	b. Kepala Bidang Anggaran	org/bulan	500.000
	c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	org/bulan	500.000
	d. Kepala Bidang Barang Milik Daerah	org/bulan	500.000
3.	<b>Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran</b>		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung :		
	a. Pagu di bawah 250 juta	org/bulan	325.000
	b. Pagu 250 juta s.d 500 juta	org/bulan	350.000
	c. Pagu 500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	375.000
	d. Pagu 1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	500.000
	e. Pagu 5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	600.000
	f. Pagu 10 milyar s.d 20 milyar	org/bulan	700.000
	g. Pagu 20 milyar s.d 50 milyar	org/bulan	800.000
	h. Pagu 50 milyar s.d 75 milyar	org/bulan	900.000
	i. Pagu 75 milyar s.d 100 milyar	org/bulan	1.000.000
	j. Pagu di atas 100 milyar	org/bulan	1.100.000
4.	<b>Bendahara Penerimaan SKPKD</b>	org/bulan	400.000
5.	<b>Bendahara Penerimaan SKPD</b>		
	Besaran Pagu Pendapatan :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000

	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000
6.	<b>Bendahara Pengeluaran SKPKD</b>	org/bulan	400.000
7.	<b>Bendahara Pengeluaran SKPD</b>		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000
8.	<b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>		
	<b>Belanja Pagu Total Belanja Langsung dan Tidak Langsung kegiatan yang dikelolanya :</b>		
	<b>a. pagu s.d 250 juta</b>	<b>org/bulan</b>	<b>150.000</b>
	<b>b. pagu &gt;250 juta s.d 500 juta</b>	<b>org/bulan</b>	<b>175.000</b>
	<b>c. pagu &gt;500 juta s.d 1 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>200.000</b>
	<b>d. pagu &gt;1 milyar s.d 5 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>225.000</b>
	<b>e. pagu &gt;5 milyar s.d 10 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>250.000</b>
	<b>f. pagu &gt;10 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>275.000</b>
9.	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</b>		
	Besaran Pagu Total Kegiatan Yang Dikelolanya :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	250.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	275.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	300.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	325.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	350.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	375.000

10.	<b>Pembantu PPTK</b>		
	Besaran Pagu Total Belanja Kegiatan yang dikelolanya :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	150.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	175.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	200.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	225.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	250.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	275.000
11.	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD)</b>	org/bulan	500.000
12.	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)</b>		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	275.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	300.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	325.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	350.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	375.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	400.000
13.	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (PPK Pembantu-SKPD)</b>		
	<b>Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung</b>		
	<b>a. pagu s.d 250 juta</b>	<b>org/bulan</b>	<b>200.000</b>
	<b>b. pagu &gt;250 juta s.d 500 juta</b>	<b>org/bulan</b>	<b>225.000</b>
	<b>c. pagu &gt;500 juta s.d 1 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>250.000</b>
	<b>d. pagu &gt;1 milyar s.d 5 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>275.000</b>
	<b>e. pagu &gt;5 milyar s.d 10 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>300.000</b>
	<b>f. pagu &gt;10 milyar</b>	<b>org/bulan</b>	<b>325.000</b>



14.	<b>Staf Pengelola Keuangan (Pembantu pada PPK-SKPKD)</b>		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	125.000
	b. pagu > 250 juta s.d 500 juta	org/bulan	150.000
	c. pagu > 500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	175.000
	d. pagu > 1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	200.000
	e. pagu > 5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	225.000
	f. pagu > 10 milyar	org/bulan	250.000
15.	<b>Staf Pengelola Keuangan (Pembantu pada PPK-SKPD)</b>		
	Besaran Pagu Belanja Langsung dan Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	125.000
	b. pagu >250 juta s.d 500 juta	org/bulan	150.000
	c. pagu >500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	175.000
	d. pagu >1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	200.000
	e. pagu >5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	225.000
	f. pagu >10 milyar	org/bulan	250.000
16.	<b>Pembuat Daftar Gaji</b>		
	Besaran Pagu Tidak Langsung :		
	a. pagu s.d 400 juta	org/bulan	150.000
	b. pagu >400 juta s.d 800 juta	org/bulan	175.000
	c. pagu >800 juta s.d 1,2 milyar	org/bulan	200.000
	d. pagu >1,2 milyar	org/bulan	225.000
17.	<b>Pengurus Barang</b>		
	Besaran aset yang dikelola :		
	a. pagu s.d 250 juta	org/bulan	200.000
	b. pagu > 250 juta s.d 500 juta	org/bulan	225.000
	c. pagu > 500 juta s.d 1 milyar	org/bulan	250.000
	d. pagu > 1 milyar s.d 5 milyar	org/bulan	275.000
	e. pagu > 5 milyar s.d 10 milyar	org/bulan	300.000
	f. pagu > 10 milyar	org/bulan	325.000
18.	<b>Pembantu Pengurus Barang</b>	org/bulan	175.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 September 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 September 2019


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014